



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan
Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja
Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN
Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. Rekrutmen Calon PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan PNS;
 - e. Pengembangan PNS; dan
 - f. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Biro Organisasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit kerja;
 - d. Ikhtisar jabatan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. Bahan kerja;
 - g. Perangkat/alat kerja;
 - h. Hasil kerja;
 - i. Tanggung jawab;
 - j. Wewenang;
 - k. Korelasi jabatan;
 - l. Kondisi lingkungan kerja;
 - m. Resiko bahaya;
 - n. Syarat jabatan;
 - o. Prestasi yang diharapkan; dan
 - p. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Kepegawaian Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 88

| No. | NAMA | JURISDIKSI | TAMBAH |
|-----|------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Drs.H.Zaimuddin HZ,MSi | Asisten Administrasi Umum |  |
| 2 | Djoko Isworo, ST, MH | kepala Biro Hukum |  |
| 3 | Drs.H.Abdul Madjid,MSi | kepala Biro Organisasi |  |

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

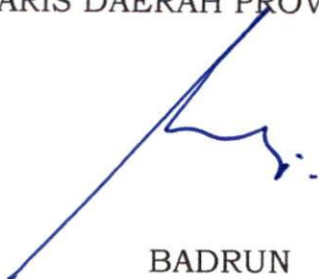
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 88

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

| No | NAMA | JURISDIKSI | PARAF |
|----|----------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Drs. H. Badrun, M.Si | Sekretaris Daerah |  |
| 2 | Drs. H. Zamuddin HZ, M.Si | Asisten Administrasi Umum |  |
| 3 | Djoko Isworo, SH, MH | Kepala Biro Hukum |  |
| 4 | Drs. H. Abdul Madjid, M.Si | Kepala Biro Organisasi |  |

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 88 TAHUN 2017
 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN
 ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAERAH

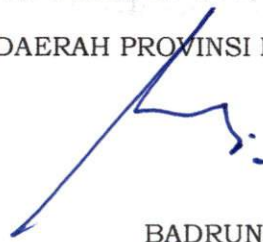
HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




| NO. | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | | | | | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Kepala Badan | 1 | | | | | |
| | 1. Sekretaris | | 1 | | | | |
| | a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | | | 1 | | | |
| | 1) Pengolala Barang Milik Negara | | | | 1 | | |
| | 2) Pengadministrasi Umum | | | | 2 | | |
| | 3) Pengadmistrasi Persuratan | | | | 1 | | |
| | 4) Pengemudi | | | | 1 | | |
| | 5) Petugas Keamanan | | | | 1 | | |
| | 6) Pramur Kantor | | | | 1 | | |
| | 7) Analis Kepegawaian | | | | | 1 | |
| | b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan | | | 1 | | | |
| | 1) Bendahara | | | | 1 | | |
| | 2) Verifikator Keuangan | | | | 1 | | |
| | 3) Pengadminstrasi Keuangan | | | | 2 | | |
| | 4) Analis Perencanaan Program | | | | 1 | | |
| | 5) Analis Perencanaan Anggaran | | | | 1 | | |
| | 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai | | 1 | | | | |
| | a. Kepala Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Kepegawaian | | | | | 1 | |
| | 2) Analis jabatan | | | | 1 | | |
| | 3) Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai | | | | 1 | | |
| | 4) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | b. Kepala Subbidang Mutasi dan Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|----------|----------|-----------|-----------|----------|---|
| | 3) Penyusun Rencana Mutasi | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang pengembangan Karir Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Pengelola Pengembangan Karir | | | | 2 | | |
| | 2) Analis Pengembangan Karir | | | | 1 | | |
| | 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai | | 1 | | | | |
| | a. Kepala Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis SDM Aparatur | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | b. Kepala Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Permasalahan Hukum | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Disiplin Pegawai | | | | 1 | | |
| | 3) Pengelola data | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Data dan informasi | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Data | | | | 1 | | |
| | 3) Pengadministrasi Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | 4) Pranata Komputer | | | | | 2 | |
| | Jumlah | 1 | 3 | 8 | 30 | 4 | |
| | Jumlah Total | | | 46 | | | |

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


BADRUN

| No | NAMA | JURISDIKSI | TAMBAH |
|----|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Drs.H. Zainuddin HZ, M.Si | Asisten Administrasi Umum |  |
| 2 | Djoko Iswara, SH, MH | Kepala Biro Hukum |  |
| | Drs.H. Abdul Madjid, M.Si | Kepala Biro Organisasi |  |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|----------|----------|-----------|-----------|----------|---|
| | 3) Penyusun Rencana Mutasi | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang pengembangan Karir Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Pengelola Pengembangan Karir | | | | 2 | | |
| | 2) Analis Pengembangan Karir | | | | 1 | | |
| | 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai | | 1 | | | | |
| | a. Kepala Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis SDM Aparatur | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | b. Kepala Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Permasalahan Hukum | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Disiplin Pegawai | | | | 1 | | |
| | 3) Pengelola data | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Data dan informasi | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Data | | | | 1 | | |
| | 3) Pengadministrasi Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | 4) Pranata Komputer | | | | | 2 | |
| | Jumlah | 1 | 3 | 8 | 30 | 4 | |
| | Jumlah Total | | | 46 | | | |

Diundangkan di Tanjung Selor
 Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|----------|----------|-----------|-----------|----------|---|
| | 3) Penyusun Rencana Mutasi | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang pengembangan Karir Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Pengelola Pengembangan Karir | | | | 2 | | |
| | 2) Analis Pengembangan Karir | | | | 1 | | |
| | 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai | | 1 | | | | |
| | a. Kepala Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis SDM Aparatur | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | b. Kepala Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Permasalahan Hukum | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Disiplin Pegawai | | | | 1 | | |
| | 3) Pengelola data | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Data dan informasi | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Data | | | | 1 | | |
| | 3) Pengadministrasi Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | 4) Pranata Komputer | | | | | 2 | |
| | Jumlah | 1 | 3 | 8 | 30 | 4 | |
| | Jumlah Total | | | 46 | | | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,







IRIANTO LAMBRIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|----------|----------|-----------|-----------|----------|---|
| | 3) Penyusun Rencana Mutasi | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang pengembangan Karir Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Pengelola Pengembangan Karir | | | | 2 | | |
| | 2) Analis Pengembangan Karir | | | | 1 | | |
| | 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai | | 1 | | | | |
| | a. Kepala Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis SDM Aparatur | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | b. Kepala Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Permasalahan Hukum | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Disiplin Pegawai | | | | 1 | | |
| | 3) Pengelola data | | | | 1 | | |
| | c. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai | | | 1 | | | |
| | 1) Analis Data dan informasi | | | | 1 | | |
| | 2) Pengelola Data | | | | 1 | | |
| | 3) Pengadministrasi Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | 4) Pranata Komputer | | | | | 2 | |
| | Jumlah | 1 | 3 | 8 | 30 | 4 | |
| | Jumlah Total | | | 46 | | | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

| No | NAMA | JABATAN | TARAF |
|----|------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Drs. H. BADRUN, M. Si | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 2 | Drs. H. ZAIMUDDIN HZ, M.Si | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| 3 | DJOKO ISWORD, SH, MH | KARO HUKUM |  |
| 4 | Drs. H. ABDUL MADJID S, M.Si | KARO ORGANISASI |  |